

Ulama & Kekuasaan: Pergulatan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia (Sebuah Ringkasan dan Komentar)

Nuhrison M. Nuh

Peneliti Kehidupan Keagamaan

Judul Asli : Ulama & Kekuasaan: Pergulatan Elit Muslim
dalam Sejarah Indonesia
Pengarang : Dr. Jajat Burhanudin
Penerbit : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam
Tahun terbit : Cetakan 1, Juni 2012
Tebal : 481 halaman termasuk indeks

Buku ini merupakan terjemahan dari disertasi penulis yang berjudul *"Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia"*, pada sekolah Leiden University di Belanda, lulus pada tahun 2007. Untuk menulis disertasi ini, Jajat melakukan penelitian di Leiden Belanda selama 4 tahun (2001 – 2005), dan selama menulis disertasinya dia dibimbing oleh Kees Van Dijk dan Nico Kaptein.

Terdiri dari 10 bab, diawali dengan pendahuluan (hal 1), bab 2 Islamisasi Negeri di Bawah Angin: Ulama dan Politik Kerajaan (15), bab 3 Membangun Ranah: Ulama di Negeri Bawah Angin yang Berubah (61), bab 4 Jaringan Timur Tengah dan Menguatnya Diskursus Islam Berorientasi Syariat (95), bab 5 Kolonialisme dan Pembentukan Elit Muslim Baru (139), bab 6 Menjadi Komunitas Berbeda: Dimensi Historis Sosiologis Pesantren (187), bab 7 Munculnya Arena Baru: Hindia Belanda Modern dan Jaringan yang Berubah (225), bab 8 Reformis Islam dan Terciptanya

Ruang Publik (279), bab 9 Menegosiasikan Modernitas: Gerakan Ulama di Hindia Belanda (323), bab 10 Ulama di Indonesia Kontemporer: Refleksi ke Depan (371).

Studi yang dilakukan oleh Jajat Burhanudin ini dimaksudkan untuk mengulas satu isu paling sentral tentang ulama, yakni argumen historis dan mekanisme yang ditempuh para sarjana Muslim untuk terus berperan aktif di tengah kehidupan umat Islam di dunia modern. Menghadapi berbagai perubahan fundamental akibat modernisasi kehidupan umat Islam, ulama terus eksis sebagai elite sosial-keagamaan dengan posisinya yang terhormat.

Meningkatnya pendidikan tinggi dan munculnya penggunaan media cetak-elektronik telah memberi kontribusi bagi munculnya ruang publik, dimana ulama hanya menjadi salah satu di antara banyak Muslim yang berbicara tentang Islam. Peran ulama sebagai ahli tunggal dalam Islam kontemporer telah berakhir, dan karenanya terjadi fragmentasi otoritas keagamaan dalam Islam.

Keberlangsungannya mengafirmasi pendapat bahwa munculnya ruang publik adalah inheren dari modernitas. Namun hal itu bukan berarti berhentinya ulama dalam menyuarakan Islam. Dengan mengadopsi berbagai cara dan metode yang diadaptasi dari modernitas, ulama terus berpartisipasi dalam pembentukan diskursus Islam kontemporer. (Jajat Burhanudin, 2012: 1-2).

Pengalaman Indonesia menjadi bukti bagi peran penting ulama sebagaimana dijelaskan diatas. Modernitas berkontribusi memberi kesempatan dan kemungkinan yang luas bagi ulama untuk mendefenisikan Islam dan membentuk otoritas. Islam Indonesia sekarang meyakinkan bagaimana ulama berpartisipasi dalam berbagai peran, melampaui wilayah tradisional mereka di dalam institusi keagamaan di pedesaan. Selain sebagai pemimpin pesantren, sejumlah ulama Indonesia kini juga terlibat, sebagai contoh, dalam memperkenalkan Islam melalui media cetak dan elektronik, yang sebelumnya diakui sebagai milik kaum reformis di perkotaan. Lebih jauh, sebagian ulama juga berpartisipasi dalam berbagai peristiwa politik akbar di Indonesia seperti pemilihan umum; ini semua menunjukkan pengaruh dan peran mereka yang berlanjut dalam masyarakat Islam. (Jajat: 2012: 2).

Tujuan dan alasan dari penulisan buku ini adalah kritik terhadap pelbagai karya sebelumnya yang menyoroti perkembangan mutakhir ketika ulama telah mapan sebagai institusi sosial keagamaan pasca berdirinya NU tahun 1926; karya-karya sebelumnya tidak memberikan perhatian kepada latar belakang intelektual dan proses sosio historis yang dialami ulama dalam sejarah Indonesia; dan menekankan sejarah sosial-intelektual yang masih terabaikan oleh karya-karya terdahulu. (M. Nur Kholis Setiawan: 2013: 1).

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan sejarah sosial, yang menempatkan teks sebagai realitas otonom, yang dengannya dibangun konstruksi historis. Teks dianggap berasal dari individu ulama yang berkontribusi pada pembentukan religiusitas umat Islam dan membentuk otoritas di tengah masyarakat. Dengan demikian, narasi berfokus pada kontribusi ulama terhadap pembentukan diskursus Islam Indonesia dan pengaruhnya terhadap konfigurasi sosial politik. (Muhamad Hisyam, 2013: 2).

Islamisasi Negeri di Bawah Angin: Ulama dan Politik Kerajaan

Di Nusantara pra-kolonial – secara tradisional disebut “Negeri di bawah angin” hubungan erat ulama dan raja (penguasa) merupakan satu karakteristik menonjol. Di Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke -13, hubungan erat ulama dan raja telah terjadi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk kerajaan Malaka pada awal abad ke 15. Sejarah Melayu, menggambarkan secara detail tentang peran penting ulama dalam kerajaan. Sejarah Melayu menyebutkan ulama memiliki posisi terhormat di dalam Istana, sebagai penasihat raja dan pejabat resmi istana (Winstedt, 1938: 129).

Berdasarkan data historis pembentukan kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Giri-Geresik, dan Mataram, ternyata Islam menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan kerajaan, dan pada gilirannya pembangunan politik dan budaya. Ulama, menjadi kelompok sosial utama yang terlibat dalam kehidupan istana kerajaan. Menyandang posisi sebagai penasihat para raja, ulama juga berperan memperkuat pelaksanaan ajaran Islam di kerajaan. Dalam bingkai budaya politik kerajaan inilah, bentuk

awal penerjemahan Islam di Nusantara berlangsung. (Jajat, 2013: 15-22).

Perlu juga diungkap, bahwa pada masa ini terjadi pelembagaan hukum, seperti Kadi, Syaikhul Islam, Pekih Najumudin dan Pengulu. Lembaga/jabatan kadi membentuk salah satu kedudukan penting ulama dalam sistem peradilan, yang memberi mereka peluang memiliki otoritas keagamaan. Melalui lembaga kadi, hukum Islam (syariat) dirumuskan dan fatwa dikeluarkan. Dengan demikian, ulama memegang peran sentral dalam regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Posisi kadi sering dianggap sebagai sebuah indikator pengaruh Islam dalam masyarakat Muslim (Gullick, 1965: 139).

Selain kadi, di kerajaan Aceh terdapat pula apa yang disebut dengan Syaikhul Islam, sebuah lembaga yang secara khusus didesain untuk memberi nasihat kepada raja. Meskipun bentuknya keagamaan, jabatan Syaikhul Islam memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan raja dalam masalah sosial dan politik. Sementara di Banten, kadi kerajaan yang oleh sumber Banten dinamai Pakih najmudin memegang peran penting dalam urusan keagamaan kerajaan. Dalam kaitannya dengan praktik hukum Islam, Kerajaan Banten, bersama-sama dengan Aceh, merupakan bukti dari meningkatnya Islam berorientasi syariat di Nusantara pada abad ke -17. (Jajat, 2013: 40-41). Masyarakat Jawa memiliki istilah khusus untuk jabatan kadi, yaitu penghulu. Sama dengan kadi, penghulu adalah jabatan yang diangkat secara resmi oleh raja untuk memikul tugas-tugas agama di kerajaan. Oleh karena itu, penghulu menjadi bagian dari administrasi kerajaan, yang hirarki strukturalnya mengikuti tingkat teritorial kerajaan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Reid (1993b:84), Islam memiliki sumbangsih

pada pembentukan kerajaan-kerajaan absolutis di Nusantara pra-kolonial, dan ulama memberi legitimasi keagamaan untuk meningkatkan absolutisme kerajaan tersebut. Pada masa ketika Islam muncul sebagai sebuah ideologi politik yang mapan di kerajaan, dan ulama dilembagakan kedalam kadi dan syaikhul Islam, absolutisme raja memperoleh momentumnya dalam sejarah Indonesia.

Membangun Ranah: Ulama di Negeri Bawah Angin yang Berubah

Peran penting Islam dalam budaya Jawa diwujudkan dalam pola hubungan para raja dengan peasantren, domain para ulama. Dalam hal ini, para raja memelopori pembangunan pesantren-pesantren di sejumlah daerah yang secara tradisional didesain untuk tujuan keagamaan, disebut desa perdikan desa-desa di bawah kekuasaan kerajaan yang diberi status khusus dalam fungsi keagamaan dan dibebaskan dari pajak. Desa perdikan memiliki makna kultural dalam sistem dan budaya politik Jawa. Ia menjadi perhatian utama raja dalam menciptakan dan mengawal tata negara (*njaga tata-tentrening praja*), dalam mana agama memegang peran penting sebagai sebuah cara vital bagi keseimbangan [harmoni antara makrokosmos dan mikrokosmos] dan karenanya harus dimasukkan sebagai tujuan pemerintahan (Jajat, 2013:79-80).

Desa perdikan membentuk komunitas-komunitas relegius di bawah kepemimpinan ulama, dimana ajaran Islam diterapkan dan aturan-aturan Islam dibuat. Dengan demikian, di desa perdikan inilah, pesantren mula-mula didirikan. Karenanya desa perdikan dianggap berkontribusi pada proses Islamisasi masyarakat lokal (Steenbrink, 1984: 169).

Melalui uraian di atas, membuktikan munculnya sebuah panorama keagamaan

baru setelah jatuhnya kerajaan-kerajaan maritim, dan berubahnya pusat pengajaran Islam dari istana ke pesantren di pedesaan Jawa. Melalui perkembangan ini, ulama mulai memasuki periode baru dalam perjalanan sejarahnya. Pesantren menggiring ulama menghadapi dan menjadi bagian masyarakat-masyarakat Muslim pedesaan, yang pada giliran berakibat pada terbentuknya diskursus keislaman yang berbeda dengan lingkungan kosmopolitan kerajaan maritim di wilayah pesisir. (Jajat, 2013: 83). Berdirinya pesantren menandai munculnya ulama sebagai elit pedesaan, baik dalam kaitannya dengan agama maupun sosio-ekonomi. Melalui pesantren inilah, otoritas ulama dibangun, yang membuat mereka memperoleh posisi kuat sebagai pemimpin masyarakat bagi kaum Muslim yang tinggal di pedesaan. (Jajat, 2013: 86). Kalau pesantren berperan di Jawa maka Surau berperan di Minangkabau dan Dayah berperan di Aceh dalam melakukan Islamisasi dalam masyarakat. (Jajat, 2013: 87-91).

Jaringan Timur Tengah dan Menguatnya Diskursus Islam Berorientasi Syariat

Dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan maritim, fungsi ulama berubah dari pejabat kerajaan, menjadi guru agama di pesantren. Maka otoritas keagamaan tidak bisa lagi dibangun hanya berdasarkan hubungan eksklusif dengan elit yang berkuasa, sebagaimana terjadi pada jabatan di kerajaan. Justru ulama sendiri, dengan pesantrennya, yang kemudian menjadi fondasi bagi otoritas keagamaan mereka di tengah-tengah umat Islam. Pada titik inilah menurut Jajat, Makkah memegang peranan penting bagi para ulama. Pengalaman belajar di Makkah dipercaya meningkatkan otoritas dan pengaruh intelektual ulama di tengah-tengah umat Islam (Djajadinigrat, 1936: 201).

Pertumbuhan institusi pendidikan yang dipimpin ulama membuat persepsi kaum Muslim Nusantara terhadap Makkah berubah. Persepsi yang berubah ini diartikulasikan dengan baik dalam pemaknaan haji. Ketimbang memaknai haji dalam kerangka politik berorientasi raja, para ulama pesantren melihat ibadah sebagai sesuatu cara efektif untuk belajar Islam (*thalab al-'ilm*), disamping melaksanakan salah satu kewajiban utama sebagai Muslim.

Didukung oleh persepsi terhadap Makkah yang makin meningkat sebagai pusat pengajaran Islam, komunitas Jawi menandai pengembaraan mereka ke Makkah untuk mencapai karir intelektual mereka di bidang *thalab al-'ilm*. Berdasarkan persepsi tersebut maka pada akhir abad ke 19 Makkah menjadi pusat penghasil ulama, bersamaan dengan kemunculannya sebagai tujuan belajar umat Islam.. Kekuasaan Syarif Usman yang netral secara agama, yang berbeda dari Dinasti Wahhabi Saudi sebelumnya yang teokratis, mendorong tumbuhnya suatu iklim intelektual yang kondusif di mana ulama dari berbagai mazhab hukum Islam yang berbeda-beda dapat hidup. Dalam situasi tersebut para imigran dari negeri-negeri Islam (*al-mujawirun*) meningkat pesat. Mereka mengisi hampir setengah dari jumlah penduduk total Makkah yang mencapai 150.000 orang pada tahun 1909. Para ulama dari negeri-negeri Islam mendirikan lingkaran pengajaran (*halaqah*) di Masjidil Haram bagi rekan-rekan setanah air mereka yang melakukan rihlah ke Makkah untuk berhaji dan *thalab al-'ilm*. Berbarengan dengan jumlah imigran yang terus meningkat, ditemukan sekitar 120 halaqah di Makkah pada akhir abad ke 19, dimana ulama mengajarkan pada muridnya beragam bidang pengetahuan Islam. Dalam kaitan inilah komunitas Jawi menjadi satu elemen penting dalam pengajaran Islam berpola *halaqah* di Makkah, yang melaluinya mereka

membangun sebuah jaringan intelektual antara Hindia Belanda dengan Timur Tengah. (Jajat, 2013: 112-113).

Salah seorang ulama Jawi terkemuka di Makkah adalah Nawawi Banten. Dia merupakan salah seorang ulama Jawi dengan pencapaian intelektual yang luar biasa baik di Makkah maupun di Hindia Belanda. Nawawi tidak hanya menginspirasi komunitas Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Salah satunya adalah Mahfudz Termas. (Jajat, 2013: 114-115). Dari tangan Nawawi dan Mahfudz, lahir sejumlah ulama terkemuka seperti Khalil Bangkalan dari Madura dan Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Selain itu sejumlah ulama penting lainnya adalah Wahab Hasbullah dari Jombang, Muhamad bakri bin Nur dari Yogyakarta, Asnawi Kudus, Muammar bin Kiai Baidawi dari Lasem, dan Ma'sum Muhammad Lasem dari Jawa Tengah, serta Kiai Abbas Buntet dari Cirebon, Jawa Barat. Sementara dari Banten adalah Haji Ilyas dari Serang, Tubagus Muhamad Asnawi dan Abdul Gaffar dari Caringin. (Jajat, 2013: 115-116).

Dengan demikian, halaqah di Makkah, khususnya dibawah bimbingan Nawawi dan Mahfudz, berkontribusi dalam mencetak ulama pesantren. Pengalaman belajar di Makkah telah meningkatkan otoritas ulama, dan pada akhirnya membentuk jaringan yang kokoh.

Selanjutnya Jajat membahas tentang watak diskursus Islam yang ditransmisikan ke Hindia Belanda. Penting ditekankan di sini bahwa peran Makkah sebagai pusat Islam berorientasi syariat pada abad ke -17 dan 18 tetap bertahan bahkan memuncak pada ke 19. Lebih dari sekadar merekonsiliasikan tasawuf dan syariat, ulama Makkah pada abad ke 19 secara sungguh-sungguh mengusung penerapan syariat Islam

dalam kehidupan keberagamaan umat Muslim.

Kecendrungan Islam berorientasi syariat di Makkah mulai menguat ketika ia menjadi pusat gerakan Islam Wahhab, seiring kontrol politik Dinasti Sau'd atas Hijaz pada tahun 1803. Pemikiran Islam berorientasi syariat inilah yang dipelajari ulama Jawi di Makkah dan ditransmisikan ke Hindia Belanda, yang kemudian menjadi substansi dari pembelajaran Islam di Pesantren. Ulama Jawi memperkenalkan dan menulis kitab-kitab kepada pembaca Muslim di Hindia Belanda. Selain itu fatwa kepada Mufti Makkah juga terlibat dalam proses transmisi tersebut. Baik kitab maupun fatwa menjadi unsur utama dalam transmisi Islam, di mana ulama Jawi memainkan peranan penting. (Jajat, 2013: 129-130).

Kolonialisme dan Pebentukan Elit Baru Muslim

Islam berorientasi syariat, semakin menguat pada abad ke -19. Dengan perkembangan tersebut, salah satu aspek utama Islam berorientasi syariat, aktivisme, tumbuh dan mewarnai diskursus masa itu, memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap perlunya pembaruan sosio-moral umat Muslim. (Rahman 1966: 193-194). Dengan aktivisme ini, Islam berorientasi syariat mengambil bentuk gerakan protes melawan stabilitas politik yang coba ditegakkan Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda. Dan Makkah dianggap Belanda sebagai sumber inspirasi bagi aktivisme anti-kolonial tersebut. (Jajat, 2013: 140 – 141).

Maka pada masa ini muncul ulama-ulama yang memberontak melawan Belanda. Sehingga di beberapa daerah terjadi perang melawan Belanda seperti perang Padri di Sumatera barat (1807-1832), perang Diponegoro di Jawa (1825-

1830), pemberontakan Banten (1888), dan perang Aceh (1873-1910). Teks-teks yang digunakan untuk mendorong masyarakat untuk berjihad antara lain kitab *Nasihat Al-Muslimin fi Faddhilati Jihad* karangan Abdussamad Al-Falimbani dan karya-karya Ahmad Rifai Kalisasak.

Untuk menghadapi pemberontakan para ulama, Belanda berkolaborasi dengan ulama pemerintah dan penghulu berusaha menjinakkan ulama yang di mata kolonial membuat kesulitan.

Menjadi Komunitas Berbeda: Dimensi Historis Sosiologis Pesantren

Akibat utama pemberontakan Banten adalah munculnya sentimen anti pegawai pemerintah di antara umat Islam Banten. Ulama menganggap mereka sebagai *kafir indianas* atau setengah kafir, dan karenanya dinilai kotor akibat hubungan mereka yang dekat dengan Belanda yang kafir.

Ranah pesantren semakin terputus dengan politik kolonial, yang menjadi domain eksklusif priyayi atau aristokrat pribumi. Ulama menjadi lebih terkonsolidasi sebagai lembaga Islam yang otoritatif di tengah-tengah umat Muslim. Mereka menjadi inti dari apa yang dikenal sebagai kaum santri. Dengan demikian, makna santri juga meluas dari semula murid pesantren menjadi sebuah komunitas. Maka baik priyayi maupun ulama pesantren berkembang menjadi dua komunitas yang secara sadar menampilkan diri dalam terma-terma keagamaan dan perilaku sosial yang berbeda. Dengan demikian, pada akhir abad ke-19 inilah mulai terbentuknya perbedaan sosial keagamaan yang terkenal, *santri*, *abangan*, dan *priyayi*, sebagaimana yang dikaji Clifford Geertz di Jawa pada tahun 1950-an. (Jajat, 2013: 188-190).

Dalam kondisi tersebut, ulama muncul sebagai komunitas berbeda menjadi inti dari komunitas santri. Meski tidak selalu eksklusif, komunitas santri mengembangkan bentuk pengetahuan agama dan praktik-praktik ritual yang berbeda dengan abangan dan priyayi.

Pada masa ini hidup seorang ulama di Jawa yaitu kyai Saleh Darat. Dia selain menjadi bagian dari kehidupan intelektual Makkah, dia juga sangat berakar dalam budaya Jawa. Selain menekankan Islam berorientasi syariat, dia juga memperkenalkan corak Islam tersebut dalam bentuk penulisan kitab yang mudah dipahami masyarakat Jawa. Saleh Darat menulis hampir semua karyanya dalam bahasa Jawa, menunjukkan bahwa dia mengabdikan kemampuan intelektualnya untuk masyarakat Jawa. Hasilnya, beberapa karyanya menjadi sumber bagi praktik keagamaan komunitas santri di Jawa. Salah satu bukunya yang monumental adalah *Majmu'at al-Syariat*, yang memiliki makna penting dalam proses integrasi pesantren dengan budaya dan masyarakat Jawa. Saleh Darat mendedikasikan *Majmu'at* untuk memberi Muslim awal sebuah doktrin-doktrin Islam yang mudah dipahami.

Munculnya Arena Baru: Hindia Belanda Modern dan Jaringan yang Berubah

Politik etis mengilhami kemajuan bagi rakyat Hindia Belanda. Sekolah dibuka luas untuk orang pribumi, tidak terbatas pada kaum ningrat, tetapi juga rakyat biasa. Dengan berdirinya sekolah-sekolah di Hindia Belanda, jumlah rakyat yang terdidik di sekolah-sekolah Barat meningkat, dari hanya 269.940 orang pada tahun 1900 menjadi 1,7 juta pada tahun 1930 an. Jumlah ini tentu saja tidak signifikan dibandingkan dengan total penduduk Hindia Belanda. Jumlah rakyat yang terdidik mencapai tidak

lebih dari 3 persen. Meski demikian, reformasi etis dalam bidang pendidikan telah menciptakan sebuah lapisan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang akrab dengan modernitas, yang diistilahkan Van Niel (1984) sebagai "elite Indonesia Modern". Mereka berbeda dari elit tradisional yang kedudukannya semata-mata berdasarkan kelahiran dan keturunan.

Melalui sekolah-sekolah tersebut muncul apa yang disebut dengan ide kemajuan. Ide kemajuan juga muncul dikalangan Muslim di daerah-daerah perkotaan di Hindia Belanda yang jumlahnya semakin meningkat pada awal abad ke 20. Di Jawa sebagian besar mereka adalah para pengusaha industri batik di kota-kota utama di Pulau Jawa. Kebanyakan mukim di kantong-kantong Muslim di perkotaan (kauman), mereka akrab dengan gaya hidup modern masyarakat kota dan lebih mudah beradaptasi dengan ide kemajuan. Kaum Muslim yang berbasis di perkotaan inilah yang memberi arah baru diskursus kemajuan, yang dirumuskan dalam terma-terma keislaman. Dengan berkembangnya ide kemajuan dikalangan Muslim maka muncullah non ulama sebagai pemimpin Muslim, mereka antara lain Raden Mas Tirtoadisurjo, H.Samanhudi, dan Ahmad Soorkatie.

Menjelang akhir abad ke-19, Makkah-yang telah lama menjadi pusat model pengajaran tradisional pesantren-mulai berubah. Hal ini terkait dengan kematian seorang ulama Jaawi terkemuka pada 1897, Nawawi Banten, dan munculnya Ahmad Khatib dari Sumatera Barat sebagai pemimpin komunitas Jawi di Makkah. Ahmad Khatib telah melahirkan perubahan model kepemimpinan intelektual di komunitas Jawi. Hal itu terlihat dari judul-judul buku yang dia tulis, dimana dia mengambil sikap yang berbeda dari Nawawi Banten. Ketimbang menulis syarah dari kitab-kitab standar,

seperti yang dilakukan Nawawi Banten, Ahmad Khatib menulsi karya-karya yang orisinal. Dan dia terlibat dalam persoalan-persoalan keislaman yang diperdebatkan di Sumatera Barat dan Hindia Belanda secara umum. Karya-karyanya ditulis untuk merespon isu-isu Islam aktual pada masa tersebut.

Murid-murid Ahmad Khatib terbagi ke dalam garis pemikiran dan orientasi Islam yang berbeda. Mereka yang berasal dari lingkungan ulama pesantren, seperti Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, mengambil peran yang berbeda dari mereka yang berada dalam lingkungan perkotaan di Hindia Belanda, seperti Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Dua ulama ini, meski belajar dengan Ahmad Khatib, mewakili dua model Islam yang masing-masing dikenal sebagai tradisional dan reformis. Hasyim Asy'ari memiliki genealogi intelektual sampai pada Nawawi Banten dan Khalil Bangkalan, sementara Ahmad Dahlan pada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Kairo, Mesir. Hasyim Asy'ari mendirikan persatuan ulama, Nahdhatul Ulama (NU), sementara Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan agenda pembaruannya.

Tidak sampai dekade terakhir abad ke-19, al-Azhar di Kairo tampil sebagai tempat tujuan belajar baru, yang secara perlahan menggantikan Makkah sebagai pusat perkembangan Islam di Hindia Belanda, Komunitas Jawi di Makkah memelopori jaringan dengan Kairo. Mereka mulai menjadikan Kairo sebagai tempat tujuan belajar, meski Makkah tetap dihormati karena jaringan intelektualnya yang telah berlangsung lama dengan Nusantara. Majalah al-Manar memainkan peranan penting bagi sikap komunitas Jawi yang tengah berubah ini. Majalah ini, dengan pesan-pesan pembaruan Islamnya, menarik komunitas Jawi di Makkah, ia telah merangsang minat yang besar terhadap

pembaruan di Kairo. Dengan semakin banyaknya mereka yang pergi belajar ke Kairo akhirnya memunculkan komunitas Jawi di Kairo. Komunitas Jawi di Kairo, seperti yang terjadi dengan komunitas Jawi di Makkah, telah berkontribusi dalam pembentukan elit keagamaan baru bagi Muslim Hindia Belanda. Beberapa pelajar yang menjadi inti dari Komunitas Jawi di Kairo, memegang peranan sentral dalam memperkenalkan dan menyebarkan pembaruan Islam dan spirit Modern Kairo kepada Hindia Belanda. Mereka menjadikan Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sebagai arena bagi karir mereka.

Menegosiasikan Modernitas: Gerakan Ulama di Hindia Belanda

Upaya menghubungkan Islam dengan modernitas muncul sebagai salah satu isu krusial di Indonesia awal abad ke-20. Tidak terkecuali ulama pesantren. Mengikuti langkah kaum priyayi baru dan Muslim reformis, mereka mulai memasuki arena dimana unsur-unsur modernitas sudah tersedia. Dalam hal ini, pengalaman sosio-intelektual dua ulama terkemuka, Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah, harus diperhatikan. Mereka mewakili kecendrungan yang semakin kuat diantara ulama-ulama Hindia Belanda periode itu, yang semakin banyak menggunakan fasilitas dan perangkat modern dalam usaha mereka merumuskan Islam tradisionalis yang telah terbentuk lama di dunia pesantren.

Muhamad Hasyim Asy'ari lahir 14 Februari 1871 di Jombang Jawa Timur. Dia datang dari keluarga *bongso poetian* terkemuka. Di Tebuireng, Jombang ia memantapkan karirnya sebagai seorang ulama, mengikuti jejak Saleh Darat dan Khalil Bangkalan. Lebih penting lagi, karir ini menegaskan kedudukan intelektualnya di lingkungan pesantren

dan keterlibatan sosialnya di lingkungan ulama Jawa.

Di Pesantren Tebuireng ia tidak hanya memberikan para santrinya pembelajaran Islam, tetapi juga berperan dalam membangun komunitas ulama. Peran kedua ini bisa dijelaskan dari kenyataan bahwa ia merupakan seorang ulama berkedudukan tinggi dalam jaringan ulama Jawa pada masa itu, yang membuatnya tampil sebagai seorang ulama senior yang memimpin ulama lain di Jawa. Dari pesantren Tebuireng, lahir banyak ulama yang kemudian menjadi tokoh komunitas Muslim masing-masing. Di atas itu, dia muncul sebagai ulama yang paling ditakzamkan di Indonesia awal abad ke-20. Ulama Jawa dan Madura sangat menghormatinya, hingga memberinya gelar "*Hadhratus Syaikh*".

Lahir Maret 1883 atau 1884, Wahab Hasbullah datang dari keluarga ulama. Dia dikenal sebagai santri kelana yang menghabiskan 15 tahun untuk mempelajari Islam di tujuh pesantren berbeda, termasuk pesantren milik Khalil Bangkalan di Madura dan Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Pengalaman belajar dari dua ulama besar tersebut mempunyai arti khusus bagi Wahab Hasbullah.

Pada tahun 1916, Wahab Hasbullah bersama Mas Mansoer mendirikan Madrasah Nahdhatul Wathan, pusat pembelajaran Islam bergaya modern yang mengikuti langkah kaum muda Sumatera Barat. Di sinilah kepemimpinan Wahab Hasbullah mulai muncul. Lewat madrasah ini, Wahab Hasbullah mulai mendirikan landasan kokoh untuk membangun jaringan kuat di antara tokoh-tokoh ulama pesantren masa depan. Di samping karena jaringannya yang kuat, naiknya Wahab sebagai pemimpin Islam juga didukung modal ekonomi yang kuat.

Wahab Hasbullah- dengan kepemimpinan yang kuat, keluasan jaringan, dan sukses usaha bisnis yang dikelola- menjalankan peran sangat penting dalam menyuarakan kepentingan baris ulama di Hindia Belanda. Dengan dukungan spiritual Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah berperan besar dalam menghubungkan dunia ulama pesantren dengan modernitas.

Yang menarik dari apa yang ditulis oleh Jajat Burhanudin tentang konsep *ahlussunah wal jama'ah*. Menurutnya konsep tersebut merupakan temuan kaum tradisionalis, dan digunakan untuk mempertahankan pendirian keagamaan mereka dari serangan kaum reformis. Dengan istilah *ahlussunah wal jama'ah*, Hasyim Asy'ari menunjukkan bahwa Islam tradisional memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta ajaran Islam yang dirumuskan ulama. Oleh karena itu, *ahlussunah wal jama'ah* merupakan tema esensial dari wacana tradisionalis. Ia bukan hanya digunakan sebagai ideologi resmi NU, tetapi juga berkembang menjadi ciri yang membedakan kaum tradisionalis dari kaum reformis. Para peuka tradisionalis meyakinkan tiap-tiap komunitasnya bahwa mereka merupakan bagian suatu faksi tunggal, *ahlussunah wal jama'ah* yang tetap setia memegang tradisi Nabi dan para sahabatnya. Dengan dasar pendirian ini, Hasyim Asy'ari berupaya mengasosiasikan kaum reformis dengan mereka yang berada diluar faksi *ahlussunah wal jama'ah*.

Beberapa Komentar

Buku ini sangat tebal sekali, sehingga tidak mungkin untuk membacanya secara keseluruhan ditengah kesibukan yang dihadapi oleh penulis. Oleh sebab itu tulisan ini hanya membahas sampai pada bab IX yang penulis anggap sesuai

dengan judul aslinya yang dibatasi ulama pada masa kolonial Belanda.

Buku ini sangat pantas dibaca bagi mereka yang berminat memperdalam tentang sejarah intelektual ulama di Indonesia, tetapi bukan berarti tanpa kritik dan catatan. Muhamad Hisyam, seorang peneliti dari LIPI memberikan beberapa catatan terhadap buku ini dalam acara bedah buku yang diadakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tanggal 13 Maret 2013 di Hotel Millenium, Jakarta.

Catatan pertama, dalam buku ini tidak ada batasan yang jelas mengenai konsep ulama, akibatnya terjadi kecanggungan tersendiri ketika diskusi tentang munculnya polarisasi tradisionalis dan reformis. Seakan-akan yang disebut dengan ulama hanya yang berasal dari kalangan taradisionalis. Sehingga M. Natsir ulama yang sangat penting dalam merumuskan bentuk Indonesia di awal kemerdekaan tidak disinggung.

Salafi adalah bentuk jaringan Indonesia-Makkah masa kini tidak dibicarakan dalam buku ini, padahal jaringan tersebut sangat mewarnai relegius umat Islam Indonesia, walaupun anti politik. Buku ini terlalu ambisi untuk meliput seluruh periode Islam di Indonesia, akibatnya kurangnya pengayaan sumber primer. Hampir 90 % narasi dan eksplasi di atas sumber sekunder. Sampai-sampai peristiwa mutakhir seperti argumen Ahmad Sidik tentang pilar NU diambil dari Barton (387-388). Meskipun demikian buku ini sangat kaya akan referensi. (Muhamad Hisyam, Maret, 2013). Dalam buku ini terdapat beberapa kekeliruan tahun dan konteks waktu, tetapi walaupun begitu buku ini punya nilai plus karena analisis historisnya yang kuat dan akurat (Muhamad Hisyam, Maret, 2013).

Prof. Dr. Phil Nurcholis Setiawan, mengkritik mengapa pemberontakan Banten hanya ditinjau dari dua paradigma, ada pendekatan tradisional dan pendekatan sejarah sosial. Dia memberi contoh buku *Atsushi Ota: "Banten Rebellion 1750-1752; Factors behind the Mass Participation"*; Modern Asian Studies 37,3 (2003: 613-651), Cambridge University Press, dimana Ota menggunakan pendekatan *socio political approach*. Selain itu dia mengutip M.C Rickleft yang menekankan bahwa pemberontakan Banten disebabkan konflik politik antara pemerintah Belanda dan elit setempat, sedangkan While J. Kathirathamby-Well menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan konsekuensi logis dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menindas rakyat Banten.

Kritik lainnya yang disampaikan, karena penulisan bab tidak dilakukan secara periodeisasi, maka nampak ke sembilan bab tersebut sekan-akan terpisah-pisah, tidak merupakan suatu rangkaian yang utuh, bagaimana caranya menghubungkan antar bab tersebut sehingga tidak terkesan adanya keterpisahan antar bab.

Kritik yang juga muncul dalam diskusi bedah buku mengapa dalam buku ini tidak diungkap peranan ulama dari kalangan perempuan. Apakah Rahmah al-Yunusiah yang mempunyai sekolah Diniyah Putri tidak bisa disebut sebagai ulama. Dalam buku ini masih terdapat beberapa kekeliruan tahun dan konteks waktu, tetapi walaupun begitu buku ini punya nilai plus karena analisis historisnya yang kuat dan akurat. Selanjutnya silahkan menyimak buku ini.